

DINAMIKA KOERSI DAN RESIPROSITAS DALAM DIPLOMASI NUKLIR MULTILATERAL: KASUS JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCOPA) DAN PASCA-PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT

Hasta Nurdayatri¹, Putri Nurannisa Pratiwi HN², Irsyad Dhahri Samad³
Faculty of Social Science and Law, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

e-mail: hastanurdayatri04@gmail.com; yakujapute@gmail.com; irsyad.dhahri@unm.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji interaksi antara tekanan dan pertukaran yang saling menguntungkan dalam konteks diplomasi nuklir multilateral. Pembahasan difokuskan pada *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dan konsekuensi dari penarikan diri Amerika Serikat. Studi ini menganalisis bagaimana instrumen tekanan seperti sanksi ekonomi dan paksaan diplomatik berinteraksi dengan prinsip saling menguntungkan (misalnya, menukar pembatasan program nuklir Iran dengan pelonggaran sanksi) dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kerja sama internasional yang bertujuan mencegah proliferasi nuklir. Artikel ini juga menguraikan evolusi hubungan antarpihak, yang beralih dari masa kerja sama yang efektif menuju ketidakstabilan yang muncul setelah tahun 2018. Analisis menunjukkan bahwa penarikan diri dari kesepakatan nuklir dan penerapan sanksi Tekanan Maksimum (*Maximum Pressure*) telah mengikis rasa saling menghormati yang menjadi landasan JCPOA, sehingga mendorong Iran untuk meningkatkan kemampuan nuklirnya dan mempercepat pengembangan senjata nuklir. Temuan ini menegaskan bahwa diplomasi nuklir yang hanya mengandalkan tekanan ekonomi tanpa adanya jaminan domestik yang stabil dan berkekuatan hukum mengenai rasa saling menghormati pada akhirnya akan mengalami kegagalan secara sistemik. Studi ini diakhiri dengan mengusulkan strategi-strategi utama untuk memperbaiki diplomasi di masa depan, seperti memperkuat kesepakatan yang saling menguntungkan melalui legislasi formal, melindungi manfaat ekonomi dari perubahan politik yang sewenang-wenang, serta mengintegrasikan dinamika keamanan kawasan ke dalam kerangka kesepakatan pengendalian senjata nuklir.

Kata kunci: Diplomasi nuklir multilateral, dinamika tekanan, pembalikan arah kebijakan, *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA), penarikan diri AS, sanksi ekonomi.

Abstract

This article examines the interplay between pressure and mutually beneficial exchanges within the context of multilateral nuclear diplomacy. The discussion focuses on the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and the consequences of the United States' withdrawal. The study analyzes how instruments of pressure such as economic sanctions and diplomatic coercion interact with principles of mutual benefit (e.g., trading limits on Iran's nuclear program for sanctions relief) to determine the success or failure of international cooperation aimed at preventing nuclear

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

proliferation. It also outlines the evolution of relations between the parties, shifting from a period of effective cooperation to the instability that emerged after 2018. The analysis demonstrates that the withdrawal from the nuclear deal and the implementation of "Maximum Pressure" sanctions undermined the mutual respect underpinning the JCPOA, thereby prompting Iran to ramp up its nuclear capabilities and accelerate its nuclear weapons development. The findings confirm that nuclear diplomacy relying solely on economic pressure absent stable, legally enshrined domestic guarantees of mutual respect is bound to fail systemically. The study concludes by proposing key strategies for improving future diplomacy, such as strengthening mutually beneficial agreements through formal legislation, insulating economic benefits from arbitrary political shifts, and integrating regional security dynamics into the framework of nuclear arms control agreements.

Keywords: Multilateral nuclear diplomacy, pressure dynamics, reversal, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), US withdrawal, economic sanctions.

INTRODUCTION

Diplomasi saat ini di bidang non-proliferasi nuklir sedang berlangsung dalam pertemuan yang sangat rentan, di mana berbagai pertimbangan seperti keamanan nasional, kedaulatan negara, serta kebutuhan mendesak untuk menjaga ketertiban dan kestabilan sistem internasional saling berhadapan. Kemenangan atau kekalahan dalam negosiasi mengendalikan senjata pemusnah massal tidak hanya bergantung pada perjanjian resmi yang ditulis, tetapi juga pada berbagai interaksi yang rumit, seperti tekanan ekonomi, insentif untuk mematuhi aturan, cara ancaman dilihat oleh pihak-pihak terlibat, serta konsistensi kebijakan politik di dalam negeri dari setiap pihak yang terlibat. Dalam sejarah diplomasi abad ke-21, di kasus perjanjian nuklir Iran yang dimana resmi disebut sebagai *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) kemudian menjadi contoh kasus yang terkenal, dengan dinamika teoritis kompleks dan penting untuk dianalisis secara akademis.

Perjanjian Nuklir Iran, yang dikenal sebagai JCPOA, ditandatangani pada 14 Juli 2015 di Wina, Austria. Penetapan ini terjadi sesudah dalam proses negosiasi yang begitu sulit dan berlangsung bertahun-tahun. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Republik Islam Iran bersama kelompok negara P5+1, yang terdiri dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok, ditambah Jerman. Perjanjian ini didukung pula oleh Uni Eropa. Saat diresmikan, JCPOA mendapatkan pujian dari para diplomat, pemimpin dunia, dan ahli hubungan internasional sebagai contoh luar biasa dari diplomasi multilateral. Perjanjian besar ini dibuat agar bisa menyelesaikan konflik diplomatik dan masalah keamanan yang sudah terjadi lebih dari sepuluh tahun. Masalah ini muncul karena kekhawatiran dari negara-negara internasional bahwa program peningkatan uranium dan fasilitas air berat Iran sedang dikembangkan secara rahasia, yang diduga digunakan untuk membuat senjata nuklir.

Dari segi teknis dan strategis, JCPOA menyusun sebuah kesepakatan yang sangat rumit dan seimbang. Iran menyetujui pembatasan yang sangat keras, jelas, dan terukur terhadap semua aspek program nuklirnya. Pembatasan ini mencakup pengurangan persediaan uranium yang sudah diperkaya, pengurangan jumlah mesin sentrifugal secara drastis, menghentikan seluruh kegiatan pengayaan di fasilitas bawah tanah, serta mengebor bagian tengah reaktor air berat

Arak untuk memutus jalur produksi plutonium yang digunakan dalam senjata. Sebagai penghargaan atas ketaatan teknis ini, komunitas internasional melalui Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa, dan Pemerintah Amerika Serikat berjanji untuk menghapus sanksi ekonomi yang besar dan berkepanjangan, yang selama bertahun-tahun telah membuat sektor keuangan, perbankan, ekspor minyak mentah, serta investasi asing di Iran lumpuh.

Perkembangan masalah nuklir Iran memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang, mulai dari tahun 1950-an. Di bawah program "*Atoms for Peace*" yang dimulai oleh Presiden Amerika Serikat Dwight D. Pada tahun 1953, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang memberikan teknologi nuklir sipil, reaktor penelitian, dan uranium yang lebih kaya kepada pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi di Iran. Dalam hubungan ini terjadi peralihan setelah Revolusi Islam tahun 1979 yang mengakhiri sistem monarki serta mendirikan yang namanya Republik Islam di bawah pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ikatan antar sekutu ini yang mula-mula strategis kemudian berubah tiba-tiba menjadi perang ideologi dan persaingan kekuatan geopolitik yang begitu sengit.

Krisis nuklir modern mulai memburuk secara resmi pada Agustus 2002, ketika sebuah kelompok oposisi Iran yang berada di luar negeri, yaitu *National Council of Resistance of Iran*, mengungkapkan adanya dua fasilitas nuklir yang tidak diumumkan sebelumnya. Fasilitas tersebut adalah pusat pengayaan uranium bawah tanah di Natanz dan pusat produksi air berat di Arak. Pengungkapan tersebut memicu peringatan keamanan internasional yang sangat tinggi. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) segera menjalankan penyelidikan yang cukup intens, dan akhirnya menemukan bahwa Iran melanggar aturan laporan yang tertuang dalam Perjanjian Penjagaan (*Safeguards Agreement*) dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), di mana Iran telah menjadi pihak dalam perjanjian tersebut sejak tahun 1970.

Sejak tahun 2006 sampai 2010, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi yang keras (termasuk Resolusi 1696, 1737, 1747, 1803, dan 1929) yang mengenai sanksi-sanksi bertahap yang semakin ketat. Sanksi tersebut mencakup pembekuan harta benda dari entitas yang terlibat dalam program nuklir dan rudal, dilarangnya pengiriman senjata, serta larangan melakukan transaksi keuangan dengan bank-bank Iran. Secara bersamaan dengan tindakan PBB, Amerika Serikat dan Uni Eropa menerapkan sanksi sendiri dan sanksi yang berlaku di luar wilayah negara mereka. Sanksi ini ditujukan pada ekspor minyak mentah Iran dan mengeluarkan Iran dari sistem pertukaran keuangan global yang disebut *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

Namun, struktur diplomasi JCPOA yang telah dirancang dengan sangat hati-hati mengalami perubahan besar pada 8 Mei 2018, ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan secara sendirian bahwa Washington akan mundur dari perjanjian tersebut. Langkah ini membuat para sekutu Eropa dan komunitas internasional merasa kaget. Pemerintah AS menerapkan pendekatan sanksi yang sangat keras dengan nama kampanye "*Maximum Pressure*" atau Tekanan Maksimal. Kampanye ini bertujuan untuk menggagalkan dasar ekonomi Iran agar memaksa Teheran kembali ke meja perundingan untuk menyetujui kesepakatan baru yang lebih ketat lagi. Kesepakatan ini tidak hanya melibatkan pembatasan pengembangan nuklir secara permanen, tetapi juga meliputi larangan pengembangan rudal balistik serta penghentian dukungan terhadap jaringan pendukung Iran di wilayah Timur Tengah.

Keputusan sendiri Amerika Serikat tersebut langsung menyebabkan penurunan bertahap ketaatan Iran terhadap kesepakatan JCPOA. Sejak Mei 2019, Iran mulai menerapkan strategi balas dendam yang terencana dengan secara rutin melanggar ketentuan teknis JCPOA setiap 60 hari sekali. Ini mengubah secara tajam situasi diplomasi regional dari masa kerja sama institusional yang teratur kembali ke siklus peningkatan ketegangan keamanan, persaingan

dalam kemampuan nuklir, dan konflik militer yang sangat berisiko di Selat Hormuz serta seluruh wilayah Teluk.

Signifikansi akademis dari kasus JCPOA terletak pada kemampuannya untuk menguji sejauh mana institusi internasional bisa efektif dalam mengelola masalah keamanan yang muncul di tengah sistem internasional yang tidak memiliki pemerintahan pusat. JCPOA bukan hanya sekadar kesepakatan pembatasan senjata, melainkan sebuah laboratorium besar yang menguji kombinasi antara tekanan ekonomi yang dalam dengan insentif untuk membuka akses ke pasar global. Runtuhnya sistem kesepakatan tersebut setelah Amerika Serikat menarik diri memberikan kesempatan bagi para ahli hubungan internasional untuk menganalisis faktor-faktor utama yang memengaruhi ketahanan dan kemudahan retaknya sebuah perjanjian internasional berskala banyak pihak.

Pertanyaan utama yang muncul dalam pembahasan akademis di bidang Hubungan Internasional dan Hukum Internasional adalah: Mengapa sebuah kesepakatan diplomatik yang dinilai sangat berhasil secara teknis oleh lembaga verifikasi independen internasional seperti IAEA bisa gagal dalam waktu yang tidak terlalu lama? Bagaimana hubungan antara sanksi ekonomi yang keras, komitmen politik di dalam negeri, dan proses dinamika lembaga memengaruhi kelanjutan perjanjian pengembangan senjata? serta apa saja pelajaran strategis yang bisa diambil untuk merancang arsitektur diplomasi multilateral di masa depan agar lebih tahan terhadap kemungkinan penarikan diri secara unilateral oleh negara-negara kekuatan utama?

Untuk menjawab rangkaian pertanyaan tersebut, penelitian ini dibuat dengan tujuan analitis berikut:

- Melakukan evaluasi secara teknis dan konseptual terhadap struktur lembaga, pembatasan nuklir, serta mekanisme insentif saling menguntungkan yang tercantum dalam JCPOA.
- Menganalisis cara kerja diplomasi yang keras dan sanksi ekonomi dalam mengubah cara negara tujuan menghitung manfaat dan biaya saat berbicara dan menerapkan kebijakan.
- Menganalisis penyebab utama keruntuhan JCPOA, terutama ketidakseimbangan komitmen politik dalam negeri (Two-Level Game) dan pengunduran diri secara sendirian oleh Amerika Serikat.
- Menganalisis dampak strategis setelah tahun 2024 terhadap kemampuan nuklir Iran, waktu strategis untuk breakout, serta masa depan sistem non-proliferasi global.
- Merancang rekomendasi kebijakan dan kerangka diplomasi multilateral yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

LITERATURE REVIEW

Penelitian tentang diplomasi nuklir, penyelesaian konflik secara multilateral, serta sistem kontrol senjata didasarkan pada berbagai teori dan bukti empiris yang melimpah dalam bidang studi Hubungan Internasional. Untuk membangun dasar analisis yang kuat dalam kasus JCPOA, tinjauan literatur ini dibagi dan dikembangkan menjadi tiga pilar teori utama: Teori Diplomasi Koersif dan Sanksi Ekonomi, Institusionalisme Neoliberal serta Rezim Non-Proliferasi, dan Teori Permainan Dua Tingkat.

➤ Teori Diplomasi Koersif dan Sanksi Ekonomi

Diplomasi koersif adalah salah satu konsep utama dalam memahami kebijakan luar negeri dan strategi keamanan. Seperti yang ditetapkan secara klasik oleh Alexander George pada tahun 1991, diplomasi koersif adalah strategi diplomatik yang bertujuan melindungi diri dengan

menggabungkan ancaman penggunaan kekuatan militer atau sanksi ekonomi bersama dengan penawaran insentif yang terorganisir, seperti hadiah atau imbalan, agar pihak lawan berhenti atau mengubah tindakan agresif atau tidak diinginkan, tanpa harus melakukan perang besar secara penuh.

George menekankan bahwa diplomasi koersif adalah jenis interaksi yang sangat rumit dan sensitif, di mana keberhasilannya bergantung pada lima konsep utama yang menjadi faktor penting.

- Target harus memahami dengan jelas apa saja tindakan yang perlu dihentikan atau diubah.
- Tingkat *Motivasi Relatif* (Motivasi Relatif): Pihak yang mengkoersi harus memiliki niat dan keinginan yang lebih kuat dibandingkan pihak yang menjadi target untuk tetap bertahan.
- Pengkoersi perlu membuat batas waktu yang diyakini oleh pihak yang dituju, sehingga keterlambatan akan menyebabkan akibat yang berat.
- Target harus yakin bahwa mematuhi aturan akan memberikan ganjaran yang nyata dan pasti.
- Target takut hukuman akan diperparah (Takut Terjadi Peningkatan Hukuman): Target perlu yakin bahwa pihak yang menuntut mampu dan ingin meningkatkan hukuman jika tuntutan tidak dipenuhi.

Dari diplomasi koersif, Hufbauer, Schott, Elliott, dan Oegg (2007) di penelitian mereka yang mendalam terkait sanksi ekonomi menyebutkan bahwa sanksi ekonomi yang dilakukan secara bersama oleh beberapa negara lebih efisien daripada sanksi yang diperbuat oleh satu negara saja. Hal ini dikarenakan sanksi multilateral menghambat upaya "*sanction busting*" seperti penyelundupan atau pertukaran perdagangan melalui negara lain, serta sepenuhnya akses diputus target terhadap sistem keuangan global dan pasar komoditas penting. Sanksi ekonomi bekerja dengan cara memengaruhi struktur ekonomi dalam negeri, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh rakyat atau kalangan berkuasa diharapkan bisa mengubah cara pemimpin politik negara yang ditargetkan menghitung manfaat dan biaya.

Dalam kasus Iran, Nephew (2017) dalam bukunya *The Art of Sanctions: A View from the Field* memberikan analisis yang mendalam mengenai cara kerja sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan PBB. Paman yang merupakan salah satu tokoh utama dalam merancang sanksi terhadap Iran di Kementerian Luar Negeri AS menjelaskan bahwa sanksi yang berhasil tidak hanya bertujuan membuat ekonomi Iran menderita, tetapi juga harus tepat sasaran dalam menimbulkan penderitaan tersebut agar sesuai dengan tujuan politik yang realistis. Kesalahan besar dalam pendekatan diplomasi keras terjadi ketika pihak yang melakukan tekanan terus menerus menerapkan tekanan tanpa memberikan opsi yang layak dan terhormat bagi pihak yang dikenai tekanan. Ketika negara yang menjadi sasaran memutuskan bahwa sanksi tetap diberlakukan, baik mereka mematuhi aturan tersebut maupun tidak, maka keinginan sasaran untuk bernegosiasi akan hilang dan berubah menjadi strategi untuk melawan.

➤ **Institusionalisme Neoliberal dan Rezim Non-Proliferasi**

Institusionalisme neoliberal, diperkenalkan oleh Robert Keohane yang diperkenalkan pertama kalinya di tahun 1984 dalam bukunya yang beredar dengan berjudul *After Hegemony, Cooperation and Discord in the World Political Economy*, memberikan penjelasan tentang bagaimana negara-negara dapat bekerja sama dan menjaga kerja sama tersebut meskipun dalam sistem internasional yang tidak memiliki aturan pusat. Keohane berargumen bahwa

institusi internasional tidak harus menghilangkan anarki agar bisa menciptakan perdamaian; justru, institusi bekerja dengan cara:

- Mengurangi biaya yang dikeluarkan saat melakukan transaksi dalam negosiasi antarnegara.
- Memberikan kejelasan dan alur informasi yang dapat dipercaya untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan informasi (ketidakpastian mengenai niat pihak lawan).
- Memberikan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan mandiri untuk mendeteksi tindakan tidak jujur.
- Membangun harapan bahwa interaksi akan terjadi lagi di masa depan, sehingga mendorong negara untuk menjaga nama baik dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam bidang keamanan dan pengendalian senjata, negara-negara sering menghadapi situasi seperti dilema tahanan, di mana ketakutan bahwa pihak lain akan bersikap tidak jujur secara diam-diam mendorong setiap negara untuk melakukan tindakan pertahanan atau mengembangkan senjata. Ahli non-proliferasi seperti Sagan (1996) dan Allison (2016) menyatakan bahwa kerangka JCPOA adalah contoh nyata dari prinsip-prinsip *Institusionalisme Neoliberal*. JCPOA memperkenalkan alat pengawasan yang paling maju dan intensif dalam sejarah diplomasi modern dengan menggabungkan verifikasi teknis dari IAEA.

Dengan menerapkan *Additional Protocol dan Comprehensive Safeguards Agreement*, IAEA diberi kekuasaan untuk mengawasi seluruh proses rantai pasok nuklir Iran, mulai dari pengambilan bijih uranium, proses di pabrik penggilingan (*yellowcake*), produksi gas uranium heksaflorida, pembuatan rotor sentrifugal, sampai ke fasilitas pengayaan dan reaktor. Keohane dan Martin (1995) menjelaskan bahwa transparansi institusional yang sangat radikal bisa mengubah cara negara berpikir strategis, risiko terbongkarnya kecurangan menjadi sangat besar, sehingga biaya politik dan militer akibat kecurangan jauh lebih tinggi dibandingkan manfaat taktis yang bisa diperoleh.

Selain itu, *institusionalisme neoliberal* juga menjelaskan peran desain inovatif seperti mekanisme "*snapback*" yang terdapat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231. Mekanisme ini dibuat agar bisa menyelesaikan kemungkinan hambatan dalam proses politik di Dewan Keamanan PBB. Cara kerjanya adalah dengan membalikkan proses pengambilan suara: jika salah satu negara anggota JCPOA mengatakan bahwa Iran melanggar aturan secara signifikan, maka seluruh sanksi PBB akan berlaku lagi dalam 30 hari, kecuali Dewan Keamanan PBB memutuskan dengan resolusi khusus untuk menghentikan pencabutan sanksi tersebut. Desain ini berhasil menghilangkan hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang sebelumnya mungkin ingin melindungi Iran, sehingga menciptakan komitmen dalam institusi yang sangat dapat dipercaya.

➤ Teori Permainan Dua Tingkat (*Two-Level Game Theory*)

Robert Putnam (1988) membuat kerangka teori *Two-Level Game Theory* untuk menganalisis dinamika negosiasi internasional yang memperhatikan juga persetujuan di dalam negeri. Putnam menjelaskan bahwa para *negosiator internasional* (pemimpin negosiasi) bekerja bersamaan di dua meja perundingan yang berbeda namun saling memengaruhi secara kuat.

- Tingkat I (Internasional / Level I): Negosiasi antara perwakilan dari negara-negara berikutnya untuk mencapai kesepakatan sementara atau kompromi awal.

- Tingkat II (Domestik): Negosiasi dilakukan di dalam negeri oleh masing-masing negara peserta untuk meratifikasi, menyetujui, dan menerapkan kesepakatan tersebut melalui lembaga legislatif, parlemen, atau koalisi para elite politik.

Konsep utama dalam kerangka Putnam adalah "*Win-Set*", yang berarti sekumpulan hasil negosiasi dari tingkat pertama yang bisa terjadi dan sangat mungkin diterima serta diakui oleh kelompok-kelompok politik di tingkat kedua. Putnam mengatakan bahwa kesepakatan internasional di tingkat pertama hanya bisa terwujud dan bertahan jika keuntungan *Win-Set* dari semua negara peserta tumpang tindih satu sama lain. Semakin luas wilayah *Win-Set* suatu negara di tingkat II, semakin mudah bagi negosiatornya mencapai kesepakatan internasional. Namun, jika *Win-Set* menjadi salah satu aktor yang sangat terbatas, atau jika kondisi politik dalam negeri berubah secara drastis hingga menghilangkan kesesuaian tersebut, maka kesepakatan internasional akan berakhir atau dibatalkan.

Analisis kualitatif oleh Maloney (2015) dan Chromhorn (2019) menggunakan kerangka Putnam untuk melihat JCPOA dan menemukan kelemahan struktural yang serius pada tingkat II di kedua negara utama, yaitu Amerika Serikat dan Iran. Di Amerika Serikat, Presiden Barack Obama menyadari bahwa ruang untuk mencapai kesepakatan di Kongres sangat terbatas karena penolakan tajam dari Partai Republik serta kelompok konservatif di Partai Demokrat yang menolak segala bentuk kompromi dengan Iran. Untuk menghindari prosedur persetujuan yang rumit, Obama memutuskan menyetujui JCPOA melalui *Sole Executive Agreement* sebuah bentuk perjanjian luar negeri yang bisa ditandatangani presiden sendiri tanpa harus mendapatkan persetujuan dua pertiga anggota Senat seperti dalam Perjanjian Internasional.

Meskipun kesepakatan *Executive Agreement* ini berhasil melewati tahap pertama dan memastikan pelaksanaan awal JCPOA, keputusan tersebut secara signifikan mengurangi stabilitas jangka panjang dari hubungan Washington. Menurut hukum tata negara Amerika Serikat, perjanjian eksekutif dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh presiden berikutnya dengan hanya menandatangani perintah presiden baru (*Executive Order*) tanpa perlu persetujuan dari lembaga legislatif.

Di sisi Iran, Presiden Hassan Rouhani dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif bertindak dalam batasan yang sangat ketat yang ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, serta diawasi secara ketat oleh Majelis Parlemen Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Kemenangan Iran secara mutlak membutuhkan bahwa setiap konsesi teknis nuklir harus dibayar secara tunai dengan cara dicabutnya sanksi ekonomi dan pemulihan aliran modal internasional. Ketika Amerika Serikat menarik diri pada tahun 2018 dan menghancurkan manfaat ekonomi yang dijanjikan, sistem dalam negeri di Teheran mengalami perubahan besar, kelompok moderat yang dipimpin Rouhani kehilangan kepercayaan politik, sedangkan kelompok yang lebih keras Principlists mengambil alih kekuasaan dalam kebijakan luar negeri dan mendorong penghentian kepatuhan terhadap JCPOA.

METHODS / METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatori untuk menganalisis dinamika kelembagaan, kinerja operasional, serta faktor-faktor penyebab runtuhnya JCPOA dengan menggunakan struktur IMRaD.

➤ Pendekatan Penelitian dan Desain Studi Kasus

Metode kualitatif dipilih sebagai pendekatan utama karena bidang diplomasi non-proliferasi dan analisis kebijakan luar negeri melibatkan berbagai faktor yang sangat rumit, seperti strategi, konsep, dan persepsi. Variabel seperti perhitungan dilema keamanan, motivasi politik dalam

negeri, kredibilitas ancaman yang keras, serta tujuan dari diplomasi tidak bisa direduksi hanya menjadi model statistik kuantitatif tanpa kehilangan konteks sejarah dan teoritisnya.

Desain studi kasus eksplanatori membantu dalam menganalisis secara mendalam fenomena JCPOA sebagai objek utama pembahasan. Dengan ini memeriksa terkait ikatan sebab-akibat antara faktor-faktor bebas seperti penerapan sanksi ekstrateritorial dan penarikan diri sepihak dari AS dengan variabel hasil seperti tingkat kepatuhan Iran terhadap perjanjian nuklir, perubahan waktu strategis untuk breakout, serta kestabilan pemerintahan yang mencegah penyebaran senjata nuklir.

➤ **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

1) Dokumen Resmi dan Hukum Internasional (Data Primer):

- Teks lengkap Perjanjian Komprehensif Bersama (JCPOA) beserta lima lampiran teknisnya (Lampiran I sampai Lampiran V) yang ditandatangani pada 14 Juli 2015.
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 tahun 2015 tentang pengesahan Perjanjian JCPOA dan penghapusan sanksi PBB yang sebelumnya diterapkan.
- Peraturan Presiden Amerika Serikat, termasuk Peraturan Eksekutif 13846, yang kembali memberlakukan sanksi sekunder terhadap Iran.
- Undang-Undang domestik Iran, terutama "Rencana Tindakan Strategis untuk Melonggarkan Sanksi dan Melindungi Kepentingan Bangsa Iran" yang ditetapkan oleh Parlemen Iran (Majlis) pada bulan Desember 2020.

2) Laporan Pemeriksaan Teknis Lembaga Internasional

- Dewan Gubernur IAEA dengan laporan bulannya yang terkait dengan penerapan Perjanjian Jaminan NPT dan pengawasan JCPOA di Iran (2015-2026).
- Data inspeksi IAEA tentang persediaan uranium yang kaya, dalam satuan kilogram, tingkat kemurnian isotop U^{235} (yaitu 3,67%, 20%, 60%), jumlah dan jenis sentrifugal aktif (IR-1, IR-2m, IR-4, IR-6), serta kondisi reaktor Arak dan fasilitas Fordow.

3) Transkrip Diplomatik dan Pernyataan Resmi:

Transkrip konferensi pers, pidato diplomatik, dan memo kebijakan dari para pejabat P5+1, wakil tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri, serta Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran.

4) Literatur Akademik dan Laporan Kebijakan (Data Sekunder):

- Artikel dari jurnal akademik terindeks internasional dalam bidang hubungan internasional, studi keamanan, dan hukum internasional.
- Laporan dari lembaga pemikir independen ternama, seperti Arms Control Association, International Crisis Group (ICG), International Institute for Strategic Studies (IISS), RAND Corporation, Center for Arms Control and Non-Proliferation, serta Carnegie Endowment for International Peace.

➤ **Operasionalisasi Variabel dan Indikator Teknis**

Untuk memastikan penilaian analitis tetap rapi dan objektif, variabel-variabel utama dijelaskan melalui indikator-indikator teknis dan ekonomi berikut ini:

- Waktu Pecah Strategis: Didefinisikan secara operasional sebagai perkiraan waktu terpendek secara teori yang dibutuhkan sebuah negara untuk memproduksi jumlah yang cukup (sekitar 25 kg uranium 90%) dari material fissil yang sangat terkaya (*Highly Enriched Uranium* - HEU, U^{235} $\geq$ 90%) untuk membangun satu bom nuklir. Waktu breakout dihitung menggunakan rumus matematika yang melibatkan beberapa variabel, yaitu $T_{breakout} = f(M_{stockpile}, C_{enrichment}, N_{centrifuges}, S_{SWU})$. Di sini, M adalah massa bahan baku awal, C adalah tingkat konsentrasi awal, N adalah jumlah mesin sentrifugal yang digunakan, dan S adalah kapasitas kerja separasi dalam unit SWU.

- Kapasitas dan Infrastruktur Pengayaan Uranium: Diukur berdasarkan total massa persediaan uranium (dalam kilogram), tingkat kemurnian persentase isotop U-235, serta jenis dan seberapa efektif mesin sentrifugal yang digunakan. Sebagai contoh, sentrifugal canggih tipe IR-6 mampu memisahkan isotop hingga 3 hingga 4 kali lebih efektif dibandingkan sentrifugal generasi awal IR-1.
 - Tingkat Fokus Ekonomi dan Sanksi: Dilihat dari beberapa indikator, seperti volume ekspor minyak mentah Iran (dalam jutaan barel per hari), tingkat inflasi tahunan di dalam negeri Iran, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam persentase, serta kondisi akses aset devisa asing Iran di bank internasional.
- **Metode Analisis Data: *Process Tracing***

Data dianalisis dengan menggunakan metode *Process Tracing*. Metode ini adalah teknik penelitian kualitatif yang dibuat khusus untuk menemukan hubungan sebab-akibat, yaitu cara-cara tertentu yang menghubungkan kondisi atau kejadian awal dengan hasil yang terjadi. Dengan menggunakan *process tracing*, peneliti mengikuti urutan peristiwa diplomatik dan teknis secara berurutan dan masuk akal, mulai dari penandatanganan JCPOA pada tahun 2015, pengakuan penuh yang dicek oleh IAEA (2015-2018), pengumuman AS menarik diri secara satu pihak dan penerapan sanksi dari luar wilayah (2018), kegagalan program insentif ekonomi Uni Eropa (INSTEX), hingga peningkatan aktivitas nuklir Iran secara perlahan (2019-2026). Langkah ini memungkinkan pemeriksaan secara nyata dengan data empiris untuk mengetahui sejauh mana teori Diplomasi Koersif, Institusionalisme Neoliberal, dan *Two-Level Game Theory* mampu menjelaskan mengapa kesepakatan tersebut gagal.

DISCUSSION / ANALYSIS

- **Kebangkitan JCPOA: Struktur Kesepakatan Teknis dan Insentif Salingsuka (2015-2018)**

Sebelum kesepakatan JCPOA dicapai pada Juli 2015, program nuklir Iran sedang berkembang dengan sangat cepat, sehingga membuat banyak negara khawatir. Estimasi yang independen menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan Iran untuk menghasilkan bahan fissil yang cukup untuk membuat satu bom nuklir hanya sekitar 2 hingga 3 minggu. Kondisi ini menyebabkan kepanikan di tingkat geopolitik, di mana Amerika Serikat dan Israel secara terbuka mempertimbangkan kemungkinan menyerang fasilitas nuklir Iran secara pra-emptif.

JCPOA berhasil menghentikan krisis ini dengan membuat desain bantuan teknis yang sangat ketat dan tepat, yang menghentikan semua kemungkinan cara yang bisa digunakan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir, baik melalui jalur uranium maupun jalur plutonium.

1) Penutupan Jalur Uranium (Fasilitas Natanz dan Fordow):

Iran wajib mengurangi persediaan uranium kaya kadar rendah (LEU) sebesar 98%, dari sekitar 10.000 kg menjadi maksimal 202,8 kg, yang setara dengan 300 kg gas UF₆. Kemurnian bahan pengayaan dibatasi hingga maksimal 3,67% U-235, yang cukup hanya untuk digunakan sebagai bahan bakar di pembangkit listrik tenaga nuklir sipil, seperti Bushehr, dan jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata, yaitu 90%.

Pembatasan Sentrifugal: Iran mengurangi jumlah mesin sentrifugal yang digunakan dari hampir 19.000 unit menjadi hanya 5.060 unit mesin sentrifugal generasi pertama (IR-1) yang diperbolehkan untuk mengolah uranium di fasilitas Natanz. Semua sentrifugal yang canggih (IR-2m, IR-4, IR-6) harus dilepas dan disimpan dengan pengawasan terus-menerus oleh IAEA.

Transformasi Fasilitas Fordow: Fasilitas bawah tanah Fordow yang dibangun melintasi lembah gunung batu untuk melindungi dari serangan udara dilarang keras digunakan untuk aktivitas pengayaan uranium atau menyimpan bahan nuklir. Fordow secara keseluruhan diubah fungsinya menjadi pusat penelitian bidang fisika dan teknologi sipil.

2) Penutupan Jalur Plutonium (Fasilitas Arak):

Reaktor Air Berat Arak (Heavy Water Reactor) telah direncanakan ulang dan dibangun kembali secara fisik melalui konsorsium internasional. Dari reaktor asli (calandria) dilepaskan dan diisi dengan beton cair hingga tidak bisa digunakan lagi. Desain baru memastikan bahwa reaktor ini hanya menghasilkan sedikit plutonium yang tidak cukup untuk keperluan militer, serta semua bahan bakar yang sudah digunakan harus dikeluarkan dari Iran selama masa kerja reaktor.

3) Rezim Transparansi dan Verifikasi Radikal IAEA:

- Iran menyetujui penerapan Protokol Tambahan dari Perjanjian Jaminan IAEA, yang memberi izin kepada inspektur IAEA untuk melakukan pemeriksaan mendadak ke semua tempat yang berasal dari Iran.
- IAEA menerapkan sistem pemantauan teknis yang canggih, seperti kamera pengawas yang terus aktif dan terhubung, segel elektronik yang tidak bisa dipalsukan, serta mengawasi aliran bahan uranium dari tambang sampai ke pusat pengayaan secara langsung dan real-time.

Dengan berhasilnya arsitektur pembatasan teknis ini, JCPOA secara nyata berhasil memperpanjang waktu strategis pemecahan reaktor nuklir Iran dari 2-3 minggu menjadi lebih dari 12 bulan atau setahun penuh. Waktu satu tahun ini dianggap oleh para perencana militer dan diplomat barat sebagai masa aman yang cukup lama, sehingga komunitas internasional memiliki kesempatan untuk mendeteksi adanya kecurangan dan melakukan langkah-langkah diplomatik atau militer sebelum Iran berhasil membuat senjata nuklir.

Sebagai bentuk pertukaran insentif, Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2231 menghapus semua sanksi dari PBB, Uni Eropa, serta sanksi sekunder AS yang berkenaan dengan program nuklir. Hasilnya sangat besar bagi perekonomian Iran ekspor minyak mentah Iran meningkat dengan cepat, dari kurang dari 1 juta barel per hari pada masa penerapan sanksi menjadi sekitar 2,5 juta barel per hari pada akhir tahun 2016. Ekonomi Iran tumbuh dengan sangat baik mencapai 12,5% pada tahun 2016, menurut informasi yang diberikan oleh Bank Dunia. Perusahaan besar Eropa seperti Total dari Prancis melakukan investasi senilai 4,8 miliar dolar untuk pengembangan lapangan gas South Pars. Sementara itu, Airbus dan Boeing menandatangani kontrak penjualan pesawat komersial senilai puluhan miliar dolar kepada maskapai Iran Air.

Hingga awal tahun 2018, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah menerbitkan 11 laporan kuartalan berturut-turut yang dengan jelas dan konsisten menyatakan bahwa Iran memenuhi semua komitmen teknis yang disepakati dalam JCPOA tanpa ada pelanggaran sama sekali.

➤ Anatomi Keruntuhan: Penarikan Diri Unilateral AS dan Kampanye "Maximum Pressure" (2018-2023)

Meskipun JCPOA berhasil secara teknis dalam mengendalikan program nuklir Iran, struktur kesepakatan tersebut mengalami kegagalan secara dasar karena perubahan dinamika politik di dalam negeri Amerika Serikat. Pada tanggal 8 Mei 2018, Presiden Donald Trump secara resmi menyatakan bahwa Amerika Serikat mengambil langkah sendirian untuk keluar dari perjanjian JCPOA.

Kritik utama yang dilontarkan pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump terhadap Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) berfokus pada argumen bahwa kesepakatan tersebut terlalu terbatas dan memiliki kelemahan yang bisa berdampak dalam jangka panjang.

- Klausul Matahari Terbenam: Adanya batas waktu otomatis yang berlaku untuk pembatasan senjata nuklir utama. Misalnya, pembatasan stok uranium dan batas tingkat pengayaan 3,67% akan berakhir setelah 15 tahun, yaitu pada tahun 2030, setelah itu secara teoritis Iran bisa mengembangkan kapasitas pengayaannya lebih lanjut secara legal berdasarkan Perjanjian Nuklir Non-Persen.
- Tidak Ada Regulasi tentang Rudal Balistik: Perjanjian JCPOA sama sekali tidak memberikan aturan atau batasan terhadap pengembangan program rudal balistik Iran yang mampu menjangkau seluruh wilayah Timur Tengah dan Eropa Tenggara.
- Kebijakan Regional Iran: Penghapusan sanksi dianggap memberi Iran dana segar senilai ratusan miliar dolar, yang menurut pemerintah AS digunakan untuk mendukung Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) serta jaringan kelompok loyal terhadap Iran di Suriah, Lebanon, Irak, dan Yaman.

Sebaliknya, Washington meluncurkan kampanye sanksi ekonomi yang keras dan diberi nama doktrin "*Maximum Pressure*" (Tekanan Maksimal). Dengan mengaktifkan kembali sanksi sekunder ekstrateritorial (seperti Executive Order 13846), Amerika Serikat mengancam untuk membatalkan akses bank, perusahaan, atau negara kepada pasar keuangan dolar dan pasar dalam negeri AS jika mereka mengambil keuntungan dari pembelian minyak atau melakukan transaksi bisnis dengan Iran.

Implikasi dari sanksi sekunder ekstrateritorial ini sangat besar. Meskipun Uni Eropa, Tiongkok, dan Rusia menolak keputusan AS untuk menarik diri dan tetap mempertahankan komitmen terhadap JCPOA, para pengusaha dunia tetap enggan mengambil risiko kehilangan akses ke pasar Amerika Serikat yang memiliki nilai hingga puluhan triliun dolar. Perusahaan-perusahaan dari Eropa menghentikan investasi secara besar-besaran dan pergi meninggalkan Iran dalam beberapa bulan. Ekspor minyak Iran mengalami penurunan besar, dari 2,5 juta barel per hari pada 2017 menjadi kurang dari 300.000 barel per hari pada periode 2019 hingga 2020. Mata uang Iran, Rial, mengalami penurunan tajam, sehingga menyebabkan inflasi dalam negeri melebihi 40-50% dan secara mendalam memengaruhi kesejahteraan rakyat Iran.

Tiga negara Eropa yang menandatangani JCPOA, yaitu Inggris Raya, Prancis, dan Jerman, berusaha menyelamatkan kesepakatan tersebut dengan menciptakan saluran pembayaran khusus bernama INSTEX (*Instrument in Support of Trade Exchanges*) pada bulan Januari 2019. Sistem tukar-menukar ini dibuat agar bisa membantu pertukaran barang-barang penting bagi manusia seperti obat dan makanan tanpa perlu menggunakan uang dolar atau cara transaksi lewat bank biasa. Namun, INSTEX terbukti tidak berjalan baik secara operasional karena perusahaan swasta masih takut terlibat dalam perdagangan dengan Iran, bahkan untuk barang kemanusiaan, karena bisa memicu sanksi dari OFAC, yang merupakan bagian dari Departemen Keuangan AS.

Karena insentif ekonomi yang dijanjikan dalam JCPOA telah rusak sepenuhnya, Iran mengubah strateginya dari "*Strategic Patience*" (Kesabaran Strategis) menjadi "*Calibrated Escalation*" (Eskalasi Terukur). Pada Mei 2019, tepat satu tahun setelah AS menarik diri, Presiden Hassan Rouhani mengatakan bahwa Iran akan mulai mengurangi kepatuhan terhadap aturan teknis JCPOA secara perlahan, setiap 60 hari, sebagai respons atas ketidakmampuan pihak Eropa memenuhi kewajibannya secara ekonomi sesuai dengan Pasal 36 JCPOA (Mekanisme Penyelesaian Sengketa).

- Juli 2019: Iran melebihi batas stok uranium sebesar 202,8 kg dan meningkatkan tingkat kemurnian pengayaannya melebihi 3,67% (mencapai 4,5%).
- November 2019: Iran memasukkan gas uranium UF₆ kembali ke mesin sentrifugal di fasilitas bawah tanah Fordow, sehingga status Fordow sebagai fasilitas yang tidak melakukan pengayaan berakhir.
- Januari 2020: Setelah serangan udara dari Amerika Serikat yang membunuh Komandan Pasukan Quds IRGC, Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad, Iran, mengumumkan langkah kelima dan terakhir, yaitu Iran tidak lagi terikat oleh pembatasan operasional apa pun terkait jumlah dan jenis sentrifugal yang digunakannya.
- Desember 2020: Parlemen Iran, yaitu Majelis, menyetujui undang-undang yang keras bernama "Rencana Aksi Strategis untuk Membatalkan Sanksi", yang memaksa pemerintah Iran untuk mengayai uranium hingga tingkat 20%, menggunakan mesin sentrifugal canggih IR-6, serta menghentikan secara sukarela protokol tambahan jika sanksi terhadap minyak dan perbankan tidak dibatalkan.

➤ Dilema Keamanan, Kebuntuan Strategis, dan Kondisi Pasca-2024

Strategi "*Maximum Pressure*" yang digunakan Amerika Serikat dan respons retaliasi bertahap dari Iran mengonfirmasi pola dinamika klasik Dilema Keamanan, seperti yang dijelaskan oleh Jervis pada tahun 1978. Tindakan keras yang dilakukan oleh satu negara untuk melindungi diri sendiri, seperti AS yang menerapkan sanksi untuk mengurangi pengaruh Iran, dianggap oleh negara yang menjadi target sebagai ancaman besar, sehingga memicu respons pertahanan atau tindakan keras balik dari negara tersebut, seperti Iran yang mempercepat program nuklirnya. Akibatnya, kedua pihak akhirnya berada dalam situasi keamanan yang jauh lebih jelek dan berisiko dibandingkan sebelum konflik terjadi.

Dari tahun 2024 hingga 2026, kondisi program nuklir Iran telah berkembang dengan kemajuan teknis yang sangat besar dan hampir tidak bisa dibalikkan.

- Penurunan strategis waktu breakout sangat berkurang: Dengan konsentrasi uranium yang telah mencapai tingkat kemurnian 60% U-235 di fasilitas Natanz dan Fordow, jarak teknis untuk mencapai tingkat kemurnian senjata yaitu 90% menjadi sangat tipis secara matematis dan fisika nuklir. Laporan IAEA dan perkiraan para pakar mengonfirmasi bahwa waktu yang dibutuhkan Iran untuk membuat bahan peledak nuklir cukup untuk satu bom telah menurun tajam dari 12 bulan pada masa kesepakatan JCPOA (2015) menjadi kurang dari seminggu, hampir tidak ada waktu breakout sama sekali.
- Iran kini tidak hanya menggunakan sentrifugal IR-1 yang lambat, tetapi juga telah menginstal dan mengoperasikan ribuan sentrifugal generasi baru yang lebih canggih, seperti IR-2m, IR-4, dan terutama IR-6. Sentrifugal IR-6 memiliki kemampuan pemisahan yang lebih baik, sehingga memungkinkan proses pengayaan uranium dalam volume yang besar dilakukan dalam ruangan yang lebih kecil dan dalam waktu yang lebih singkat.
- Kebutaan informasi IAEA (Lingkup Pemeriksaan yang Tidak Terpantau): Sejak penerapan Additional Protocol dihentikan dan kamera pengawas tambahan IAEA dinonaktifkan oleh Iran pada tahun 2021-2022, IAEA kehilangan kemampuan untuk memahami secara akurat jumlah rotor sentrifugal yang dihasilkan serta lokasi penyimpanan yellowcake dan uranium. Kondisi ini memberi risiko besar bahwa sebagian bahan atau komponen nuklir bisa dipindahkan ke tempat yang tidak tercatat.

Runtuhnya arsitektur JCPOA memberikan empat pelajaran strategis dan teoritis penting yang mendasari ilmu hubungan internasional dan diplomasi pengendalian senjata masa depan.

- Kerentanan Perjanjian Eksekutif Tanpa Ratifikasi Legislatif: Pelajaran utama dari kasus JCPOA adalah bahaya besar yang bisa terjadi jika hanya mengandalkan komitmen dari pemerintah tanpa didukung oleh persetujuan dari lembaga legislatif nasional (*Two-Level Game*). Pilihan presiden Obama untuk menjadikan JCPOA sebagai Perjanjian Eksekutif agar menghindari perselisihan di Senat AS memungkinkan perjanjian itu disetujui dengan cepat, tetapi juga menciptakan kerentanan serius yang bisa memengaruhi kebijakan eksekutif di masa depan. Perjanjian non-proliferasi masa depan harus dibuat dengan melibatkan undang-undang yang mengikat secara domestik atau terbentuknya kesepakatan bersama dari kedua pihak di tingkat II agar tidak hancur setiap kali terjadi pergantian pemerintahan.
- Batas efektivitas sanksi koersif secara sendirian adalah sanksi ekonomi yang keras terbukti efektif untuk mendorong negara yang ditargetkan datang ke meja perundingan. Namun, jika sanksi digunakan terus-menerus tanpa didampingi oleh jaminan yang dapat dipercaya tentang pencabutan sanksi, maka sanksi tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk mendorong diplomasi. Jika negara tujuan menemukan bahwa mematuhi perjanjian tidak akan membuat mereka terbebas dari tekanan ekonomi, negara tersebut akan terdorong untuk membangun kemampuan nuklir yang lebih kuat sebagai bentuk perisai untuk mencegah serangan.
- Kebutuhan akan perlindungan terhadap sanksi asimetris: Gagalnya mekanisme INSTEX dari Uni Eropa menunjukkan bahwa negara-negara kecil dan sektor swasta internasional tidak memiliki perlindungan dari sanksi sekunder yang berlaku di luar wilayah negara-negara tersebut, yang dikeluarkan oleh negara penguasa keuangan seperti AS. Arsitektur diplomasi multilateral di masa depan memerlukan pembuatan instrumen keuangan yang independen dan terstruktur secara internasional agar investasi pribadi tidak terkena sanksi dari tindakan tunggal satu negara.
- Isolasinya Isu Nuklir vs. Dinamika geopolitik regional menunjukkan bahwa strategi JCPOA yang sengaja memisahkan isu teknis pengayaan nuklir dari masalah-masalah tambahan seperti rudal balistik dan persaingan daerah berhasil mempercepat pencapaian kesepakatan pada tahun 2015. Namun, pemisahan ini menyebabkan kerentanan jangka panjang karena lawan-lawan JCPOA di Tingkat II seperti Kongres AS, Israel, dan negara-negara Teluk terus memanfaatkan isu-isu sekunder tersebut untuk merusak kelegitimitan JCPOA. Negosiasi tentang pengendalian senjata masa depan harus menerapkan pendekatan dua jalur, yaitu dengan membatasi pembahasan teknis nuklir melalui jalur utama, sementara secara bersamaan mendorong diskusi di forum keamanan regional melalui jalur sekunder.

Kasus *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) memberikan manfaat teoretis, empiris, dan praktis yang sangat penting bagi penelitian tentang diplomasi modern, pengendalian senjata, sistem non-proliferasi, dan hukum internasional. Analisis evaluatif yang didasarkan pada kerangka kerja akademis IMRaD ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kemitraan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian kesepakatan teknis yang baik dalam negosiasi internasional (Tingkat I), tetapi juga sangat bergantung pada adanya dukungan politik yang kuat di dalam negeri (Tingkat II) serta konsistensi dalam memberikan insentif resiprositas yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

JCPOA pada dasarnya menunjukkan sejarah kemenangan dari upaya diplomasi yang melibatkan banyak negara dan sistem neoliberal yang berbasis institusi. Perjanjian ini secara nyata berhasil mengurangi risiko penyebaran peluruhan nuklir di wilayah Timur Tengah, memutus jalur impor uranium dan plutonium Iran, serta memperpanjang waktu yang dibutuhkan Iran untuk mencapai kemampuan nuklir secara strategis dari beberapa minggu hingga lebih dari setahun. Hal ini dilakukan di bawah sistem pengawasan yang sangat ketat yang pernah diterapkan oleh IAEA.

Namun, pengunduran diri sendiri Amerika Serikat pada Mei 2018 dan pelaksanaan kampanye sanksi ekstrateritorial "*Maximum Pressure*" mengungkapkan kelemahan mendasar dalam struktur kesepakatan tersebut. Tidak adanya jaminan hukum yang mengikat yang melindungi insentif ekonomi Iran dari perubahan kepemimpinan politik di Washington telah merusak dasar kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini memaksa Iran mengambil strategi balasan dengan mempercepat pengembangan nuklir, yang selama periode 2024-2026 telah membuat program nuklir Iran mencapai tingkat pengayaan 60%, menguasai sentrifugal canggih bernama IR-6, serta mengurangi waktu breakout hingga mendekati nol.

Kegagalan dalam mempertahankan JCPOA menciptakan contoh buruk dan dampak berat bagi sistem pengendalian senjata nuklir global. Peristiwa ini membuat negara-negara berkembang kehilangan kepercayaan terhadap komitmen diplomatik jangka panjang dari negara-negara besar. Selain itu, fenomena ini bisa mendorong negara-negara yang berada di ambang penggunaan nuklir untuk berpikir bahwa memiliki kemampuan mengancam secara nuklir adalah satu-satunya cara yang benar-benar bisa menjaga keamanan eksistensinya dari ancaman perubahan pemerintahan atau sanksi dari luar negeri.

Dalam menangani krisis nuklir Iran maupun dalam kasus non-proliferasi di wilayah geopolitik lainnya harus menerapkan tiga prinsip reformasi dasar:

- Lembaga Ratifikasi Multitingkat (*Multi-Level Ratification Bind-in*): Proses negosiasi diplomatik yang berisiko tinggi harus melibatkan mekanisme persetujuan hukum dalam negeri, seperti ratifikasi yang dilakukan oleh parlemen atau senat, sejak awal pembentukan kesepakatan. Langkah ini sangat penting untuk memperluas pengaruh politik domestik dan memastikan komitmen dalam perjanjian tetap berlangsung secara stabil, sehingga tidak mudah dibatalkan oleh kebijakan yang tidak konsisten dari pejabat eksekutif yang berubah.
- Proteksi Insentif Ekonomi Terinstitusi (*Institutionalized Economic Protection*): Kesepakatan yang menggabungkan konsesi teknis dengan penghapusan sanksi perlu dilengkapi dengan alat jaminan keuangan atau ketentuan kompensasi internasional yang memiliki dasar hukum. Instrumen ini bertujuan melindungi entitas swasta dan negara lain yang berinvestasi secara resmi, jika salah satu negara utama yang terlibat membatalkan komitmen mereka tanpa sepengetahuan atau persetujuan.
- Pendekatan keseluruhan melalui keamanan regional paralel: Meskipun pembatasan teknis nuklir tetap menjadi prioritas utama yang terpisah, proses diplomasi perlu diimbangi dengan forum diskusi keamanan regional secara bersamaan. Memasukkan isu stabilitas regional dan perkembangan teknologi ke dalam kerangka keamanan yang mencakup semua pihak akan membantu mencegah permasalahan keamanan menjadi lebih parah antar negara-negara tetangga.

REFERENCE

- Allison, G. (2016). The Nuclear Deal in Prospect: Assessing the Joint Comprehensive Plan of Action. *International Security*, 40(4), 35-52.
- Arms Control Association. (2022). *The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at a Glance*. Arms Control Association Fact Sheets.
- Center for Arms Control and Non-Proliferation. (2023). *Fact Sheet: The Iran Deal, Then and Now*. Center for Arms Control.
- Cohen, R. S. (2025). *The Revenge of the JCPOA: Lessons from the Collapse of Multilateral Arms Control*. RAND Corporation Commentary / Lawfare.

- DePetrus, D. (2021). *"Maximum pressure" harms diplomacy and increases risks of war with Iran*. Defense Priorities Policy Explainer.
- EBSCO Research Starters. (2025). *Joint Comprehensive Plan of Action (Iran Nuclear Deal): Historical and Diplomatic Context*. EBSCO Information Services.
- George, A. L. (1991). *Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War*. United States Institute of Peace Press.
- Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A., & Oegg, B. (2007). *Economic Sanctions Reconsidered* (3rd ed.). Peterson Institute for International Economics.
- International Atomic Energy Agency (IAEA). (2015-2026). *Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security Council resolution 2231 (2015)* [Quarterly Reports of the Director General]. IAEA Board of Governors.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the Security Dilemma. *World Politics*, 30(2), 167-214.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). The Promise of Institutional Theory. *International Security*, 20(1), 39-51.
- Maloney, S. (2015). *Iran's Political Economy since the Revolution*. Cambridge University Press.
- Nephew, R. (2017). *The Art of Sanctions: A View from the Field*. Columbia University Press.
- Paramasatya, S., & Wiranto, S. (2019). Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 297-314.
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games. *International Organization*, 42(3), 427-460.
- Rouhi, M. (2020). *The JCPOA at 5: how the US squandered an unprecedented diplomatic opening with Iran*. International Institute for Strategic Studies (IISS).
- Sagan, S. D. (1996). Why Do States Build Nuclear Weapons? Three Models in Search of a Bomb. *International Security*, 21(3), 54-86.
- United Nations Security Council. (2015). *Resolution 2231 (2015) / adopted by the Security Council at its 7488th meeting, on 20 July 2015 (S/RES/2231)*. United Nations Digital Library.